

POLICY BRIEF

DANA BAGI HASIL (DBH) SAWIT

RINGKASAN EKSEKUTIF:

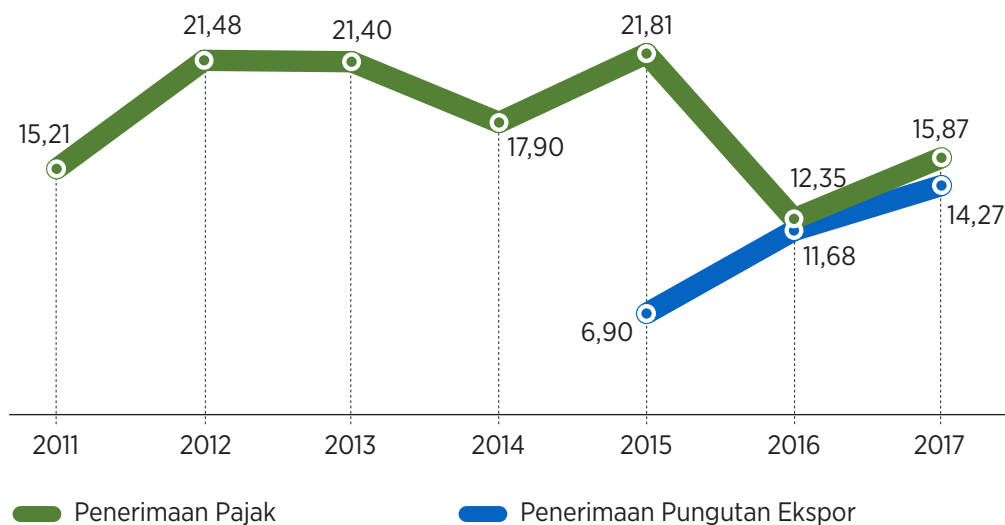
- Sektor perkebunan sawit dan produk turunannya merupakan sumber kekayaan alam yang tata kelolanya diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi;
- Daerah penghasil sawit tidak mendapatkan bagi hasil dari penerimaan negara, sehingga kapasitas pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola terkendala oleh minimnya kapasitas fiskal daerah;
- Prinsip tata kelola DBH Sawit mengacu pada *revenue sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan fiskal antar daerah serta tata kelola sawit berkelanjutan.
- DBH Sawit dialokasikan dengan mekanisme *earmarking*.

PENDAHULUAN

Dengan luas lahan perkebunan sawit di seluruh daerah mencapai 16,38 juta hektare (Kementerian Pertanian, 2020), produksi minyak sawit Indonesia mencapai 52 juta ton (BPS, 2020), pemerintah memungut penerimaan negara berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea keluar (BK). Sedangkan, PNBP terdiri dari pungutan ekspor (PE) dan penerimaan dari penyaluran benih sawit. Pada 2018, total penerimaan negara sekitar Rp 27 triliun (Kementerian Keuangan, 2018).

Namun, hanya sebagian kecil hasil penerimaan negara dari sawit yang ditransfer ke daerah. Misalnya, PBB perkebunan dan PPh pasal 21 (karyawan) dan pasal 25/29 (orang pribadi). PBB perkebunan sudah 100% ditransfer ke daerah sedangkan PPh pasal 21 dan pasal 25/29 baru 20%. Keduanya pun bukan penerimaan utama dari sektor sawit, karena penerimaan terbesar adalah PPh badan dan pungutan ekspor (KPK, 2016).

Gambar 1. Penerimaan Pajak dan Pungutan Ekspor Minyak Sawit dan Produk Turunannya, 2011-2017 (triliun rupiah)



(Sumber: KPK, 2019)

Prinsip desentralisasi tata kelola sektor sumber daya alam belum sepenuhnya berjalan. Masih ada komoditas sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah dan tanggung jawab tata kelolanya diberikan kepada pemerintah daerah, tapi sebagian besar hasil dari penerimaan negaranya masuk ke kas pemerintah pusat. Penerimaan itu tidak dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), seperti lazimnya sistem desentralisasi fiskal di sektor

sumber daya alam kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Sektor tersebut yaitu perkebunan sawit.

Padahal, merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebagian besar kewenangan dalam tata kelola sawit berada di tangan pemerintah daerah. Misalnya, kewenangan dalam perizinan dan pengawasan. Artinya, secara prinsip dasar desentralisasi, kasus ini tidak lazim, karena tidak berfungsinya prinsip *money follow function*. Seharusnya, besarnya kewenangan yang dilimpahkan disertai anggaran yang sesuai dengan besarnya kewenangan itu (Brodjonegoro & Simanjuntak, 2005; Fadliya & McLeod, 2010). Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap sektor perkebunan sawit, karena sektor sumber daya alam lain, seperti kehutanan, pertambangan, dan perikanan memiliki DBH Sumber Daya Alam.

Kondisi seperti ini berdampak terhadap tata kelola sektor perkebunan sawit. Pemerintah daerah tidak optimal menjalankan kewenangannya. Misalnya, pemda tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap izin-izin perkebunan sawit yang diterbitkannya (KPK, 2016). Alhasil, banyak kasus pelanggaran terjadi, seperti kebakaran lahan, pencemaran lingkungan, penerabasan kawasan hutan, dan eksploitasi tenaga kerja (Gaveau *et al*, 2016; Vijay *et al*, 2016; Petrenko *et al*, 2016). Parahnya, atas pelanggaran tersebut, pemda melakukan pembiaran. Padahal sektor ini mestinya mendapatkan pengawasan yang ketat, karena memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi (Bakhtiar *et al*, 2019).

Tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh pemda terjadi karena minimnya anggaran. Banyak daerah penghasil sawit yang tidak memiliki kapasitas fiskal. Alokasi belanja pemerintah daerah habis hanya untuk belanja pegawai dan fungsi pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Meski ada yang memiliki kapasitas fiskal besar, seringkali pengajuan belanja untuk sektor perkebunan sawit ditolak oleh DPRD dengan alasan sektor ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, sepantasnyalah pemerintah daerah penghasil sawit menuntut adanya skema DBH Sawit

Risalah kebijakan ini menganalisis mekanisme DBH Sawit sebagai sebuah terobosan dalam memperbaiki tata kelola desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan *revenue sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata kelola sektor perkebunan sawit. Risalah kebijakan ini penting dalam upaya perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dalam tata kelolanya.



KEBIJAKAN DBH SUMBER DAYA ALAM

Sejak tahun 2001, Indonesia melakukan desentralisasi tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya melimpahkan beberapa tugas dan tanggung jawab (*share of authority*) ke pemerintah daerah, tapi diikuti pelimpahan anggaran atau desentralisasi fiskal (Nasution, 2016). Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah mengurangi ketidakseimbangan vertikal (*center-region*) dan horizontal (*region-region*) serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk mengeksekusi program-program pembangunan (Seymour & Turner, 2002).

Skema desentralisasi fiskal di Indonesia bersifat *intergovernmental transfer relations*. Yakni, sumber penerimaan pemerintah pusat sebagian ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan, yang disesuaikan dengan *share of authority* ke pemerintah daerah (Brodjonegoro & Simanjuntak, 2005).

Bahl (1999) menyebutkan, secara prinsip desentralisasi fiskal merupakan model transfer keuangan antara pemerintah (pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dengan formulasi yang disepakati. Konsep desentralisasi fiskal merupakan wujud dari *money follow function*, yaitu pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah diiringi dengan pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*expenditure assignment, revenue assignment*).

Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalances*) serta antardaerah (*horizontal fiscal imbalances*), (2) menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, mendukung keseimbangan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro, (5) meningkatkan tata kelola fiskal yang akuntabel, transparan, dan efisien serta tepat sasaran dan (6) mendekatkan pemerintah dengan rakyat (Siddik, 2009; Mardiasmo, 2009).

Di Indonesia, tata kelola desentralisasi fiskal diatur dalam Undang – Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang direvisi menjadi UU. No. 9/2015 dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di revisi terakhir menjadi UU. No. 33/2004.

Ada beberapa skema dana perimbangan yang digunakan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Dana Dekonsentrasi. Semua komponen memiliki skema-skema tertentu sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai (Saputra & Lumbantoruan, 2017).

Untuk DBH, skemanya bersifat *share revenue*. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil, berdasarkan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Agustina *et al*, 2012). DBH terdiri dari DBH Sumber Daya Alam, DBH Pajak, dan DBH Cukai. Prinsip pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyalurannya berdasarkan realisasi penerimaan (Saputra & Lumbantoruan, 2017).

Sumber penerimaan DBH Sumber Daya Alam terdiri dari penerimaan dari kehutanan, penerimaan dari pertambangan umum, penerimaan dari perikanan, penerimaan dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi, dan penerimaan dari pertambangan panas bumi. Persentase pembagian DBH Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Skema Pembagian DBH Sumber Daya Alam di Indonesia (persen)

No	Jenis Penerimaan	UU. No. 33/2004				UU Otsus Papua dan UUPA
		Pusat	Propinsi	Kab/Kota	Kab/Kota Lainnya dalam Provinsi	
1	Kehutanan					
	• Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	20	16	64	-	80
	• Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20	16	32	32	80
	• Dana Reboisasi	60	-	40	-	40
2	Pertambangan Umum					
	• Iuran tetap (Landrent)	20	16	64	-	80
	• Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>royalty</i>)	20	16	32	32	80
3	Perikanan	20	-	-	80	80
4	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2	70
5	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2	70
6	Panas Bumi	20	16	32	32	80

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2015)



Penyelenggaraan DBH Sawit dapat mengacu pada DBH Kehutanan, yang muncul karena adanya fungsi ekonomi dari penatalaksanaan sektor kehutanan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pemerintah memberlakukan ketentuan penerimaan negara melalui pengaturan mengenai iuran dan dana pemanfaatan hutan. Sebagai konsekuensi yang timbul dari kegiatan pemanfaatan hutan adalah terdapat sejumlah iuran dan dana yang harus dibayarkan, yang menjadi PNPB yang bersumber dari sumber daya hutan. Setiap pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan memiliki kewajiban untuk membayar PNPB kehutanan sesuai dengan jenis dan tarif yang diberlakukan untuk setiap jenis perizinan dan sumber daya hutan yang dihasilkan.

DBH Kehutanan mengacu pada sistem pembagian *by origin* yaitu dibagi kepada daerah penghasil sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004. DBH nya dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapat porsi lebih besar, dan daerah lain dalam provinsi bersangkutan, mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

DBH sebagian besar bersifat block grant, sebagian di-earmarked untuk penggunaan tertentu seperti DBH DR untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Mekanisme *earmarking* ini juga berlaku pada DBH Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merupakan dana yang dalam APBN dialokasikan kepada daerah yang merupakan provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penerimaan negara



dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling sedikit sebesar 50% dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah. Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang kesehatan untuk mendukung program JKN yang meliputi:

1. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
2. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan.



KEBIJAKAN DBH SAWIT

3.1 KONSEP DBH SAWIT

Secara prinsip, DBH Sawit merupakan bagian dari sistem *revenue sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penerimaan negara yang bersumber dari sektor perkebunan sawit dan produk turunannya. Sebagai salah satu bagian dari sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi tata kelola pemerintahan, DBH Sawit merupakan sebuah konsep yang relevan digunakan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan kewenangan tata kelola sektor tersebut.

Sesuai dengan tata kelola desentralisasi fiskal di Indonesia, tujuan DBH Sawit adalah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah penghasil, untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan sawit. Ini bukan sekedar cara sederhana berupa penerapan fungsi penerimaan daerah, tapi membangun sebuah sistem tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Dengan adanya DBH Sawit, pemerintah daerah harus memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian yang akuntabel dan terukur. Misalnya, pemda harus memiliki data periodik luas areal perkebunan sawit, produksi dan produktivitas lahan serta menggunakan data tersebut untuk mengendalikan dampak ekspansi perkebunan sawit terhadap lingkungan hidup dan sosial.

Oleh karena itu, perlu kerangka formulasi DBH Sawit berkinerja yang kuat dan kompatibel dengan upaya mewujudkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan.

Artinya, formulasi DBH Sawit tidak hanya berdasarkan realisasi produksi dan daerah penghasil, tapi juga mengukur sejauh mana prinsip tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai insentif kinerja daerah dalam kontribusi pembangunan berkelanjutan. Indikator kinerja tersebut antara lain luas lahan perkebunan yang sudah memiliki sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sehingga upaya pemerintah pusat untuk pengembangan ISPO pun bisa terealisasi dengan baik.

Pemerintah juga perlu mengatur mekanisme alokasi penggunaan DBH Sawit dengan prinsip Earmarking, artinya bahwa pemanfaatan DBH sawit harus ditujukan untuk mengurangi eksternalitas negatif dan juga untuk pengembangan industri sawit itu sendiri, seperti halnya pungutan atas ekspor komoditas hasil perkebunan sawit dan/atau turunannya.

Penggunaan dana sawit ini pun di earmark untuk beberapa hal yaitu pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit, penelitian dan perkembangan perkebunan sawit, promosi, peremajaan, sarana dan prasarana, termasuk termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Untuk itu earmark DBH sawit penting, agar alokasi penggunaan DBH Sawit oleh pemerintah daerah tepat sasaran. Soalnya politik penganggaran di daerah sangat dinamis dan sesuai kepentingan penguasa di daerah. Bila ini tidak diatur, resikonya tinggi untuk disalahgunakan demi kepentingan politik.

SUMBER DBH SAWIT

Banyak sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari sektor sawit, seperti penerimaan pajak dan PNBP. Pada kertas kebijakan ini, DBH Sawit diambil dari PNBP yang bersumber dari pungutan ekspor terhadap komoditas sawit dan produk turunannya. Alasannya, dana dari pungutan ekspor memenuhi prinsip *revenue sharing*, yang merepresentasikan penerimaan dari hasil sawit di daerah penghasil. Sehingga, perhitungannya sangat mudah dilakukan, dengan basis data produksi CPO di setiap daerah penghasil.

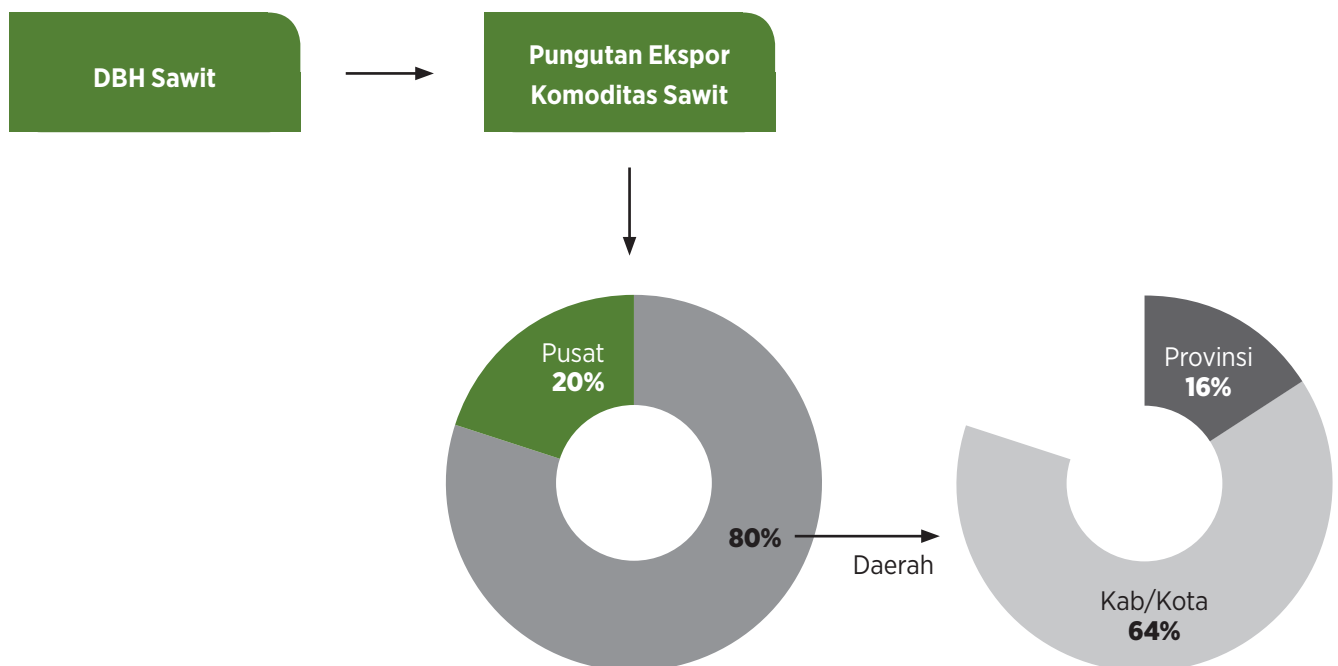
Dana pungutan ekspor secara mandat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, juga sangat relevan digunakan sebagai DBH Sawit. Karena tujuannya adalah untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit, dalam prinsip desentralisasi pemerintahan di Indonesia, kewenangan tata kelola tersebut berada di pemerintah daerah. Selain itu, dana pungutan ekspor jumlahnya cukup besar. Jika pemerintah konsisten melakukan pungutan ekspor ini setiap tahun, maka dari aspek kapasitas

fiskal dan keberlanjutan fiskal, dana tersebut sangat kredibel dijadikan sumber DBH Sawit.

FORMULASI DBH SAWIT

DBH Sawit menganut prinsip *revenue sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Basisnya adalah produksi minyak sawit (CPO) yang dihasilkan oleh daerah (*by origin*) dan realisasi penerimaan negara dari hasil produksi tersebut (*by actual*). Dalam kertas kebijakan ini, formulasi yang ditawarkan untuk tahap awal pengembangan DBH Sawit adalah bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Skema ini sebenarnya sudah diimplementasikan dalam kebijakan DBH di sektor kehutanan. Selanjutnya, bagi hasil dari pemerintah daerah dibagi lagi: 16% untuk pemerintah provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Definisi dari daerah penghasil adalah kabupaten/kota yang memiliki area perkebunan sawit dan menghasilkan tandan buah segar dari area yang ditanami sawit tersebut. Secara sederhana formulasinya dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Formulasi DBH Sawit





SIMULASI DBH SAWIT

DBH Sawit disimulasikan menggunakan formulasi di atas. Beberapa data dan asumsi digunakan dalam simulasi ini. Pertama, untuk menghitung produksi di setiap daerah, digunakan data produksi CPO, yang didapat dari luas data tutupan sawit yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada 2019, dikalikan dengan rata-rata produktivitas lahan sawit di Indonesia, yaitu 3,1 ton CPO per hektar per tahun. Kedua, sumber DBH diambil dari penerimaan pungutan ekspor. Di sini diasumsikan rata-rata penerimaannya per tahun mencapai Rp 11,6 triliun, dengan asumsi dana ekspor sawit dan produk turunannya dipungut setiap tahun dengan tarif antara USD 10-50 per ton, sesuai peraturan mengenai tarif pungutan ekspor sawit dan produk turunannya.

Hasil simulasi disajikan pada tabel 2. Data pada tabel ini menunjukkan daerah yang menerima DBH Sawit terbesar yaitu Provinsi Riau, dengan distribusi alokasi sebesar Rp 386,7 milyar untuk pemerintah provinsi dan Rp 1,54 triliun untuk kabupaten/kota penghasil sawit. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara dengan alokasi distribusi sebesar Rp 237,3 milyar untuk pemerintah provinsi dan Rp 949,5 miliar untuk kabupaten/kota penghasil sawit. Untuk detail alokasi dapat dilihat di tabel 2, sedangkan detail di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran.

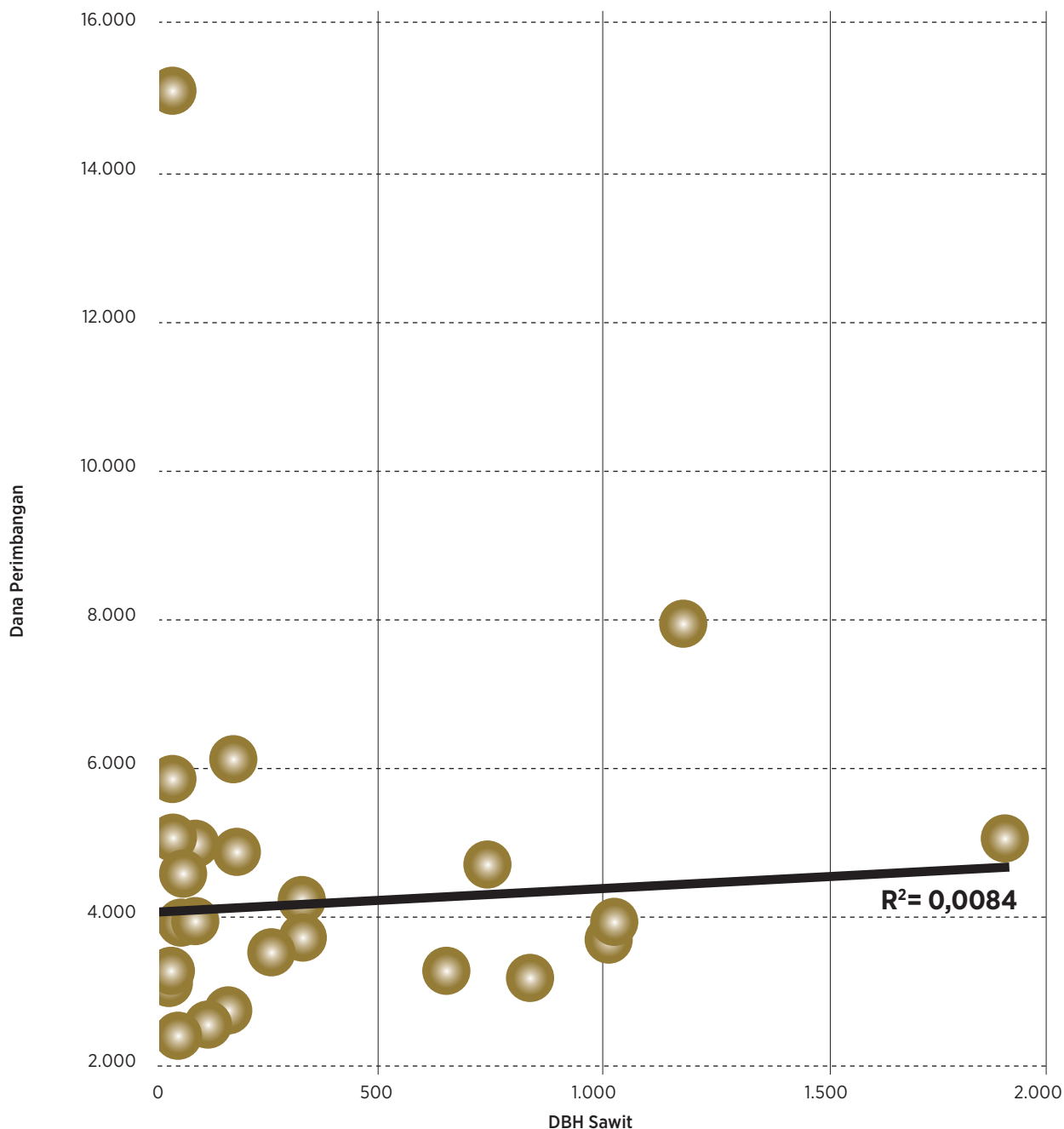
Tabel 2. Hasil Simulasi DBH Sawit menurut Provinsi Penghasil

No	Provinsi	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)	PNBP/ Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
					Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	Aceh	535.002	1.658.506	381.798.805.613	76.359.761.123	61.087.808.898	244.351.235.592
2	Sumatera Utara	2.079.027	6.444.984	1.483.676.744.081	296.735.348.816	237.388.279.053	949.553.116.212
3	Sumatera Barat	558.683	1.731.917	398.698.513.494	79.739.702.699	63.791.762.159	255.167.048.636
4	Riau	3.387.206	10.500.339	2.417.245.552.660	483.449.110.532	386.759.288.426	1.547.037.153.703
5	Kep. Riau	1.134.640	3.517.384	809.724.443.648	161.944.888.730	129.555.910.984	518.223.643.935
6	Jambi	426.508	1.322.175	304.373.151.847	60.874.630.369	48.699.704.295	194.798.817.182
7	Bengkulu	1.468.468	4.552.251	1.047.957.444.048	209.591.488.810	167.673.191.048	670.692.764.191
8	Sumatera Selatan	273.842	848.910	195.424.593.790	39.084.918.758	31.267.935.006	125.071.740.025
9	Kep. Bangka Belitung	4.926	15.271	3.515.390.441	703.078.088	562.462.470	2.249.849.882
10	Lampung	268.061	830.989	191.299.041.184	38.259.808.237	30.607.846.589	122.431.386.358
11	Banten	18.365	56.932	13.105.997.856	2.621.199.571	2.096.959.657	8.387.838.628
12	Jawa Barat	14.997	46.491	10.702.458.473	2.140.491.695	1.712.393.356	6.849.573.422
13	Kalimantan Barat	1.807.643	5.603.693	1.290.006.277.312	258.001.255.462	206.401.004.370	825.604.017.479
14	Kalimantan Tengah	1.778.702	5.513.976	1.269.352.823.244	253.870.564.649	203.096.451.719	812.385.806.876
15	Kalimantan Selatan	549.953	1.704.854	392.468.436.647	78.493.687.329	62.794.949.864	251.179.799.454
16	Kalimantan Timur	1.287.449	3.991.092	918.775.052.219	183.755.010.444	147.004.008.355	588.016.033.420
17	Kalimantan Utara	234.535	727.059	167.373.547.901	33.474.709.580	26.779.767.664	107.119.070.657
18	Sulawesi Selatan	31.980	99.138	22.822.205.905	4.564.441.181	3.651.552.945	14.606.211.779
19	Sulawesi Barat	155.958	483.470	111.297.860.804	22.259.572.161	17.807.657.729	71.230.630.914
20	Sulawesi Tengah	110.901	343.793	79.143.385.149	15.828.677.030	12.662.941.624	50.651.766.495
21	Sulawesi Tenggara	55.786	172.937	39.811.118.781	7.962.223.756	6.369.779.005	25.479.116.020
22	Gorontalo	11.257	34.897	8.033.445.024	1.606.689.005	1.285.351.204	5.141.404.815
23	Maluku	14.966	46.395	10.680.335.634	2.136.067.127	1.708.853.701	6.835.414.806
24	Maluku Utara	3.950	12.245	2.818.877.840	563.775.568	451.020.454	1.804.081.818
25	Papua Barat	58.656	181.834	41.859.265.464	8.371.853.093	6.697.482.474	26.789.929.897
26	Papua	110.496	342.538	78.854.360.965	15.770.872.193	12.616.697.754	50.466.791.018
TOTAL		16.381.957	50.784.067	11.690.819.130.021	2.338.163.826.004	1.870.531.060.803	7.482.124.243.213

Keterangan: Produksi CPO merupakan estimasi dari luas tutupan lahan dikalikan produktivitas lahan per hektar, yaitu 3,1 ton/hektar/tahun

Selanjutnya, dari hasil simulasi di atas, kita coba melakukan analisis kapasitas fiskal dengan melakukan perbandingan antara dana perimbangan dan DBH Sawit. Data yang digunakan pada level provinsi. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3. Di mana terjadi peningkatan kapasitas fiskal di beberapa provinsi dengan adanya DBH Sawit tersebut. Artinya, DBH Sawit memiliki kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal dan memperkecil gap fiskal antar provinsi di Indonesia.

Gambar 3. Komposisi Dana Perimbangan dan DBH Sawit menurut Provinsi di Indonesia (miliar rupiah)



(Sumber: DJPK, 2020 dan Hasil Simulasi)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Nilai eksternalitas dari pengusaha perkebunan sawit cenderung tinggi dan beban biaya pemulihannya ditanggung oleh daerah. Salah satu konsekuensi operasional sektor sawit ini adalah tingginya tingkat deforestasi dari pembukaan hutan dan lahan untuk perkebunan sawit, degradasi lahan dan lingkungan, juga berdampak terhadap kohesi sosial dalam masyarakat. Semua eksternalitas negatif tersebut menimbulkan biaya lingkungan dan biaya sosial. Pada praktiknya, biaya-biaya ini menjadi beban daerah dan masyarakat sekitar konsesi. Misalnya, kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang menciptakan kerugian mencapai Rp 221 triliun (World Bank, 2016).

Minimnya penanganan masalah-masalah di atas salah satunya disebabkan oleh minimnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tata kelola. Padahal, fungsi pemerintah daerah sangat besar, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sesuai dengan mandat desentralisasi tata kelola pemerintahan. Tidak berfungsinya kewenangan tersebut disebabkan oleh sistem desentralisasi fiskal di sektor perkebunan sawit yang belum berjalan sebagaimana desentralisasi fiskal di sektor sumber daya alam lainnya, seperti kehutanan, pertambangan dan perikanan.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peranan pemerintah daerah dalam tata kelola sektor perkebunan sawit, diperlukan instrumen peningkatan kapasitas fiskal daerah lewat mekanisme DBH Sawit. DBH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan daerah, tapi lebih luas lagi adalah instrumen untuk perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan. DBH Sawit mengatur mekanisme *updating* data secara bertingkat dari kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat, yang selama ini tidak pernah dioptimalkan, sehingga data terkait sawit di Indonesia tidak pernah kredibel dan valid.

DBH Sawit juga menjadi instrumen *check and balance* antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena terkait dengan proses pencairan DBH Sawit ke daerah. Tentu saja, pencairan DBH Sawit harus diikuti oleh pertanggungjawaban daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola sawit. Mekanisme ini menjadi sangat bermanfaat dalam memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam mekanisme DBH Sawit diatur indikator-indikator yang terhubung dengan perbaikan tata kelola sawit, seperti ISPO, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan dan sebagainya.

Dari aspek tersebut, pemerintah perlu merumuskan DBH Sawit. Untuk mendesain DBH Sawit tersebut, diperlukan terobosan kebijakan, antara lain:

1. Memperbaiki kerangka regulasi terutama menyangkut kebijakan DBH. Tanpa regulasi yang baik, DBH Sawit tidak bisa dilaksanakan. Dalam rangka itu, hadirnya rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi *entry point* dalam menyusun kerangka regulasi DBH Sawit serta turunan regulasi lainnya.
2. Perlu mengembangkan sumber penerimaan negara yang akan dijadikan obyek DBH Sawit. Prioritas utamanya adalah PNBPN dari pungutan ekspor. Alasannya, selain jumlahnya besar dibanding penerimaan lain dari sawit, prinsipnya juga sesuai dengan DBH, karena basisnya adalah jumlah realisasi produksi yang diekspor. Meski pencatatan ekspornya ada di pelabuhan ekspor, namun bisa diproksi dengan jumlah produksi dan luas lahan perkebunan sawit yang terdapat di daerah penghasil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mereformasi tata kelola dana pungutan ekspor sawit tersebut sesuai dengan prinsip DBH Sumber Daya Alam yang ada saat ini.
3. Pemerintah perlu membangun indikator kinerja daerah yang kredibel terkait mekanisme formulasi DBH Sawit. Direkomendasikan basis datanya adalah luas tutupan sawit dan produksi CPO berdasarkan daerah penghasil. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan modifikasi dalam indikator DBH Sawit kedepannya, sesuai dengan prioritas tata kelola sawit di Indonesia, seperti luas lahan sawit di daerah yang sudah memiliki sertifikasi ISPO.
4. Pemerintah perlu menerapkan prinsip earmarking dalam mengatur mekanisme penggunaan dan pemanfaatan DBH Sawit oleh pemerintah daerah. Hal ini penting, agar tujuan dari DBH Sawit, yaitu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola sawit berkelanjutan dapat dicapai. Kertas kebijakan ini merekomendasikan penggunaan DBH Sawit hanya diperbolehkan untuk (1) peremajaan sawit rakyat, (2) peningkatan sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit, (3) pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit, (4) riset dan pengembangan sawit, dan (5) promosi sawit. Kegiatan dan program yang disusun oleh pemerintah daerah dengan menggunakan DBH Sawit harus mengacu kepada lima agenda tersebut.
5. Pemerintah perlu membangun sistem data yang transparan. Karena ini terkait dengan beberapa indikator yang digunakan dalam DBH Sawit, maka data dan formulasi yang digunakan harus terbuka bagi publik, sehingga pengawasan publik menjadi kuat dan penyelewengannya dana tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina CA, Ahmad E, Nugroho D, Siagian H. 2012. Political economy of natural resources revenue sharing in Indonesia. Asia Research Center Working Paper 55. World Bank, LSE Asia Research Center and Center for Development Research University of Bonn.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik ekspor-impor Indonesia, 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahl R. 1999. Implementation rules for decentralization. Paper presented at the International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute, November 17, 1998. Atlanta, GA: International Studies Program, School of Policy Studies, Georgia University.
- Bakhtiar *et al.* 2019. Palm inside: Resolving the oil palm invasion inside forest zone. Jakarta: Yayasan Kehati.
- Brodjonegoro, PS., Bambang & R. Simanjuntak. 2005. Study on decentralization framework and fiscal and administrative capacity of local governments in Indonesia". Mimeo. Indonesia of University. 2005.
- Fadliya, McLeod RH. 2010. Fiscal transfer and regional governments in Indonesia. Working Papers in Trade and Development. Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Economics and Government, ANU College of Asia and the Pacific.
- Gaveau, David L. A. *et al.* 2016. Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. Scientific Reports 6 (September). Retrieved (<http://dx.doi.org/10.1038/srep32017>).
- Kementerian Pertanian. 2019. Luas tutupan sawit di Indonesia, 2019. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- KPK. 2016. Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Laporan kajian. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mardiasmo. 2009. Kebijakan desentralisasi fiskal di era reformasi: 2005-2008. Artikel dalam Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara. 2009. Era baru

kebijakan fiskal: Pemikiran, konsep, dan implementasinya. Penerbit Buku Kompas.

Nasution A. 2016. Government decentralization program in Indonesia. ADBI Working Paper Series No. 601. Asian Development Bank Institute.

Petrenko, Chelsea, Julia Paltseva, and Stephanie Y. Searle. 2016. Ecological impacts of palm oil expansion in Indonesia. Washington, DC. Retrieved November 3, 2016 (www.theicct.org).

Saputra W, Lumbantoruan M. 2017. Efektifitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) bagi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Publish What You Pay.

Seymour, R. & Turner, S. 2002. Regional autonomy: Indonesia's decentralization experiment". *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4.

Vijay, Varsha *et al.* 2016. The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss edited by M. Anand. PLOS ONE 11(7): e0159668. Retrieved April 20, 2017 (<http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0159668>).

LAMPIRAN

Hasil Simulasi DBH Sawit

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
1	ACEH	ACEH BARAT	32.059,71	99.385,1
2	ACEH	ACEH BARAT DAYA	23.650,85	73.317,6
3	ACEH	ACEH BESAR	514,69	1.595,5
4	ACEH	ACEH JAYA	20.596,91	63.850,4
5	ACEH	ACEH SELATAN	15.855,43	49.151,8
6	ACEH	ACEH SINGKIL	67.875,08	210.412,7
7	ACEH	ACEH TAMIANG	73.294,47	227.212,9
8	ACEH	ACEH TENGAH	2,57	8,0
9	ACEH	ACEH TENGGARA	16.783,95	52.030,2
10	ACEH	ACEH TIMUR	58.969,47	182.805,4
11	ACEH	ACEH UTARA	55.836,34	173.092,7
12	ACEH	BENER MERIAH	5.741,39	17.798,3
13	ACEH	BIREUEN	10.783,56	33.429,0
14	ACEH	LANGSA	5.318,47	16.487,2
15	ACEH	LHOKSEUMAWE	923,85	2.863,9
16	ACEH	NAGAN RAYA	106.105,16	328.926,0
17	ACEH	PIDIE	927,59	2.875,5
18	ACEH	PIDIE JAYA	1.858,56	5.761,5
19	ACEH	SABANG	28,41	88,1
20	ACEH	SIMEULUE	2.301,10	7.133,4
21	ACEH	SUBULUSSALAM	35.573,66	110.278,3
22	BANTEN	LEBAK	11.298,32	35.024,8
23	BANTEN	PANDEGLANG	7.038,56	21.819,5
24	BENGKULU	BENGKULU	4.709,44	14.599,3
25	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	34.443,18	106.773,8
26	BENGKULU	BENGKULU TENGAH	29.604,45	91.773,8
27	BENGKULU	BENGKULU UTARA	112.543,88	348.886,0
28	BENGKULU	KAUR	15.040,81	46.626,5
29	BENGKULU	KEPAHIANG	41,62	129,0
30	BENGKULU	LEBONG	76,31	236,5
31	BENGKULU	MUKO-MUKO	165.454,15	512.907,9
32	BENGKULU	REJANG LEBONG	83,67	259,4
33	BENGKULU	SELUMA	64.516,58	200.001,4

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
22.879.066.236	4.575.813.247	3.660.650.598	14.642.602.391
16.878.173.865	3.375.634.773	2.700.507.818	10.802.031.274
367.302.155	73.460.431	58.768.345	235.073.379
14.698.761.816	2.939.752.363	2.351.801.891	9.407.207.562
11.315.053.435	2.263.010.687	1.810.408.550	7.241.634.199
48.438.316.643	9.687.663.329	7.750.130.663	31.000.522.651
52.305.810.671	10.461.162.134	8.368.929.707	33.475.718.830
1.833.965	366.793	293.434	1.173.737
11.977.681.586	2.395.536.317	1.916.429.054	7.665.716.215
42.082.925.886	8.416.585.177	6.733.268.142	26.933.072.567
39.847.000.777	7.969.400.155	6.375.520.124	25.502.080.498
4.097.283.155	819.456.631	655.565.305	2.622.261.219
7.695.568.958	1.539.113.792	1.231.291.033	4.925.164.133
3.795.466.236	759.093.247	607.274.598	2.429.098.391
659.292.550	131.858.510	105.486.808	421.947.232
75.720.804.236	15.144.160.847	12.115.328.678	48.461.314.711
661.963.750	132.392.750	105.914.200	423.656.800
1.326.342.667	265.268.533	212.214.827	848.859.307
20.277.452	4.055.490	3.244.392	12.977.570
1.642.157.111	328.431.422	262.745.138	1.050.980.551
25.386.757.757	5.077.351.551	4.061.881.241	16.247.524.965
8.062.924.583	1.612.584.917	1.290.067.933	5.160.271.733
5.022.989.110	1.004.597.822	803.678.258	3.214.713.031
3.360.841.452	672.168.290	537.734.632	2.150.938.529
24.580.001.125	4.916.000.225	3.932.800.180	15.731.200.720
21.126.893.203	4.225.378.641	3.380.302.912	13.521.211.650
80.315.725.001	16.063.145.000	12.850.516.000	51.402.064.000
10.733.711.802	2.146.742.360	1.717.393.888	6.869.575.553
29.699.087	5.939.817	4.751.854	19.007.416
54.455.121	10.891.024	8.712.819	34.851.278
118.074.567.570	23.614.913.514	18.891.930.811	75.567.723.245
59.710.936	11.942.187	9.553.750	38.214.999
46.041.559.694	9.208.311.939	7.366.649.551	29.466.598.204

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
34	GORONTALO	BOALEMO	1.789,94	5.548,8
35	GORONTALO	GORONTALO	1.655,71	5.132,7
36	GORONTALO	GORONTALO UTARA	795,99	2.467,6
37	GORONTALO	POHUWATO	7.015,42	21.747,8
38	JAMBI	BATANG HARI	124.509,36	385.979,0
39	JAMBI	BUNGO	82.205,95	254.838,4
40	JAMBI	JAMBI	112,56	348,9
41	JAMBI	KERINCI	93,85	290,9
42	JAMBI	MERANGIN	85.815,40	266.027,7
43	JAMBI	MUARO JAMBI	193.642,07	600.290,4
44	JAMBI	SAROLANGUN	82.396,44	255.429,0
45	JAMBI	SUNGAI PENUH	5,72	17,7
46	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	273.475,63	847.774,4
47	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	184.547,47	572.097,2
48	JAMBI	TEBO	110.123,39	341.382,5
49	JAWA BARAT	BOGOR	3.151,91	9.770,9
50	JAWA BARAT	CIANJUR	13,78	42,7
51	JAWA BARAT	GARUT	3.241,70	10.049,3
52	JAWA BARAT	PANGANDARAN	7,37	22,8
53	JAWA BARAT	SUBANG	942,22	2.920,9
54	JAWA BARAT	SUKABUMI	7.664,37	23.759,6
55	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	3,62	11,2
56	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	113.249,04	351.072,0
57	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	87.533,32	271.353,3
58	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	45.798,59	141.975,6
59	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	520.133,92	1.612.415,1
60	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	127.141,08	394.137,3
61	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	164.173,18	508.936,9
62	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	46.059,64	142.784,9
63	KALIMANTAN BARAT	MEMPAWAH	13.360,95	41.418,9
64	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	334,32	1.036,4
65	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	132.923,54	412.063,0
66	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	267.925,93	830.570,4
67	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU	91.634,24	284.066,2
68	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	1.900,88	5.892,7
69	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	192.254,88	595.990,1
70	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	2.068,04	6.410,9

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
1.277.374.673	255.474.935	204.379.948	817.519.791
1.181.580.423	236.316.085	189.052.868	756.211.471
568.047.772	113.609.554	90.887.643	363.550.574
5.006.480.999	1.001.296.200	801.036.960	3.204.147.840
88.854.760.013	17.770.952.003	14.216.761.602	56.867.046.409
58.665.389.659	11.733.077.932	9.386.462.345	37.545.849.382
80.324.626	16.064.925	12.851.940	51.407.761
66.973.249	13.394.650	10.715.720	42.862.879
61.241.235.275	12.248.247.055	9.798.597.644	39.194.390.576
138.190.574.845	27.638.114.969	22.110.491.975	88.441.967.901
58.801.333.313	11.760.266.663	9.408.213.330	37.632.853.320
4.084.517	816.903	653.523	2.614.091
195.162.930.360	39.032.586.072	31.226.068.858	124.904.275.430
131.700.310.121	26.340.062.024	21.072.049.619	84.288.198.477
78.588.369.169	15.717.673.834	12.574.139.067	50.296.556.268
2.249.329.575	449.865.915	359.892.732	1.439.570.928
9.836.382	1.967.276	1.573.821	6.295.284
2.313.404.548	462.680.910	370.144.728	1.480.578.911
5.259.568	1.051.914	841.531	3.366.124
672.405.793	134.481.159	107.584.927	430.339.708
5.469.597.007	1.093.919.401	875.135.521	3.500.542.085
2.582.814	516.563	413.250	1.653.001
80.818.956.113	16.163.791.223	12.931.032.978	51.724.131.912
62.467.211.485	12.493.442.297	9.994.753.838	39.979.015.350
32.683.666.661	6.536.733.332	5.229.386.666	20.917.546.663
371.187.954.702	74.237.590.940	59.390.072.752	237.560.291.009
90.732.857.350	18.146.571.470	14.517.257.176	58.069.028.704
117.160.419.641	23.432.083.928	18.745.667.143	74.982.668.571
32.869.966.426	6.573.993.285	5.259.194.628	21.036.778.513
9.534.898.652	1.906.979.730	1.525.583.784	6.102.335.138
238.585.551	47.717.110	38.173.688	152.694.752
94.859.446.840	18.971.889.368	15.177.511.494	60.710.045.978
191.202.446.136	38.240.489.227	30.592.391.382	122.369.565.527
65.393.788.041	13.078.757.608	10.463.006.087	41.852.024.346
1.356.545.020	271.309.004	217.047.203	868.188.813
137.200.617.510	27.440.123.502	21.952.098.802	87.808.395.206
1.475.832.645	295.166.529	236.133.223	944.532.893

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
71	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	21.501,08	66.653,3
72	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU	193,82	600,8
73	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	51.027,81	158.186,2
74	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	14.448,85	44.791,4
75	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	21,41	66,4
76	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	4.567,72	14.159,9
77	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	187.721,79	581.937,6
78	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	6.265,05	19.421,7
79	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	120.842,23	374.610,9
80	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	76.940,19	238.514,6
81	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	66.499,88	206.149,6
82	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	13.398,81	41.536,3
83	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	30.123,85	93.383,9
84	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	38.894,92	120.574,2
85	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	49.335,12	152.938,9
86	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	172.353,17	534.294,8
87	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	59.653,74	184.926,6
88	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	249.714,05	774.113,6
89	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	533.174,83	1.652.842,0
90	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	112.119,99	347.572,0
91	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	4.911,32	15.225,1
92	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA	7.415,51	22.988,1
93	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU	106.886,53	331.348,3
94	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN	330.621,61	1.024.927,0
95	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	73.327,33	227.314,7
96	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	37,59	116,5
97	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	135.571,71	420.272,3
98	KALIMANTAN TIMUR	BONTANG	276,66	857,6
99	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	134.182,30	415.965,1
100	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	210.707,85	653.194,3
101	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	488.927,72	1.515.675,9
102	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	17.367,73	53.840,0
103	KALIMANTAN TIMUR	PASER	235.674,03	730.589,5
104	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	62.073,28	192.427,2
105	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	475,33	1.473,5
106	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	61.525,71	190.729,7
107	KALIMANTAN UTARA	MALINAU	425,80	1.320,0

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
15.344.011.751	3.068.802.350	2.455.041.880	9.820.167.521
138.319.185	27.663.837	22.131.070	88.524.278
36.415.448.126	7.283.089.625	5.826.471.700	23.305.886.801
10.311.264.304	2.062.252.861	1.649.802.289	6.599.209.154
15.281.382	3.056.276	2.445.021	9.780.084
3.259.704.152	651.940.830	521.552.664	2.086.210.657
133.965.631.634	26.793.126.327	21.434.501.061	85.738.004.246
4.470.987.196	894.197.439	715.357.951	2.861.431.805
86.237.751.983	17.247.550.397	13.798.040.317	55.192.161.269
54.907.534.570	10.981.506.914	8.785.205.531	35.140.822.125
47.456.919.532	9.491.383.906	7.593.107.125	30.372.428.500
9.561.917.048	1.912.383.410	1.529.906.728	6.119.626.911
21.497.557.968	4.299.511.594	3.439.609.275	13.758.437.099
27.756.937.121	5.551.387.424	4.441.109.939	17.764.439.757
35.207.477.475	7.041.495.495	5.633.196.396	22.532.785.584
122.997.981.603	24.599.596.321	19.679.677.057	78.718.708.226
42.571.248.807	8.514.249.761	6.811.399.809	27.245.599.237
178.205.739.286	35.641.147.857	28.512.918.286	114.051.673.143
380.494.465.513	76.098.893.103	60.879.114.482	243.516.457.928
80.013.221.376	16.002.644.275	12.802.115.420	51.208.461.681
3.504.907.532	700.981.506	560.785.205	2.243.140.821
5.291.998.219	1.058.399.644	846.719.715	3.386.878.860
76.278.420.500	15.255.684.100	12.204.547.280	48.818.189.120
235.944.543.322	47.188.908.664	37.751.126.932	151.004.507.726
52.329.256.918	10.465.851.384	8.372.681.107	33.490.724.427
26.826.216	5.365.243	4.292.195	17.168.778
96.749.289.542	19.349.857.908	15.479.886.327	61.919.545.307
197.433.992	39.486.798	31.589.439	126.357.755
95.757.750.548	19.151.550.110	15.321.240.088	61.284.960.351
150.369.382.501	30.073.876.500	24.059.101.200	96.236.404.801
348.917.991.107	69.783.598.221	55.826.878.577	223.307.514.309
12.394.294.288	2.478.858.858	1.983.087.086	7.932.348.344
168.186.224.351	33.637.244.870	26.909.795.896	107.639.183.585
44.297.928.966	8.859.585.793	7.087.668.635	28.350.674.538
339.211.819	67.842.364	54.273.891	217.095.564
43.907.159.188	8.781.431.838	7.025.145.470	28.100.581.880
303.870.764	60.774.153	48.619.322	194.477.289

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
108	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	129.860,12	402.566,4
109	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	42.723,69	132.443,4
110	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA	56.707,28	175.792,6
111	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	61.327,58	190.115,5
112	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	29.767,03	92.277,8
113	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	37.075,59	114.934,3
114	KEP. BANGKA BELITUNG	BELITUNG	39.156,02	121.383,7
115	KEP. BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	49.738,29	154.188,7
116	KEP. BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	70,09	217,3
117	KEP. RIAU	BATAM	78,90	244,6
118	KEP. RIAU	BINTAN	4.847,46	15.027,1
119	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	42,11	130,5
120	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	12,97	40,2
121	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	20.005,64	62.017,5
122	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	47.562,02	147.442,3
123	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	11.952,87	37.053,9
124	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	18.768,77	58.183,2
125	LAMPUNG	MESUJI	76.893,92	238.371,1
126	LAMPUNG	PESAWARAN	3.336,63	10.343,6
127	LAMPUNG	PESISIR BARAT	8.942,04	27.720,3
128	LAMPUNG	PRINGSEWU	864,20	2.679,0
129	LAMPUNG	TANGGAMUS	83,92	260,2
130	LAMPUNG	TULANG BAWANG	36.594,97	113.444,4
131	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	6.613,23	20.501,0
132	LAMPUNG	WAY KANAN	36.388,34	112.803,9
133	MALUKU	MALUKU TENGAH	14.543,94	45.086,2
134	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	421,79	1.307,6
135	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	3.663,92	11.358,2
136	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	286,06	886,8
137	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	1,40	4,4
138	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	10,63	32,9
139	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	25,50	79,0
140	PAPUA	BOVEN DIGOEL	23.275,48	72.154,0
141	PAPUA	JAYAPURA	18.053,42	55.965,6
142	PAPUA	KEEROM	23.113,92	71.653,1
143	PAPUA	MAPPI	3.246,83	10.065,2
144	PAPUA	MERAUKE	34.282,71	106.276,4

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
92.673.271.043	18.534.654.209	14.827.723.367	59.310.893.468
30.489.302.635	6.097.860.527	4.878.288.422	19.513.153.686
40.468.534.706	8.093.706.941	6.474.965.553	25.899.862.212
43.765.767.152	8.753.153.430	7.002.522.744	28.010.090.977
21.242.917.321	4.248.583.464	3.398.866.771	13.595.467.085
26.458.595.847	5.291.719.169	4.233.375.336	16.933.501.342
27.943.271.592	5.588.654.318	4.470.923.455	17.883.693.819
35.495.192.566	7.099.038.513	5.679.230.811	22.716.923.242
50.017.907	10.003.581	8.002.865	32.011.460
56.307.416	11.261.483	9.009.187	36.036.746
3.459.334.831	691.866.966	553.493.573	2.213.974.292
30.049.080	6.009.816	4.807.853	19.231.411
9.254.460	1.850.892	1.480.714	5.922.854
14.276.807.423	2.855.361.485	2.284.289.188	9.137.156.751
33.942.122.511	6.788.424.502	5.430.739.602	21.722.958.407
8.530.037.144	1.706.007.429	1.364.805.943	5.459.223.772
13.394.128.276	2.678.825.655	2.143.060.524	8.572.242.097
54.874.514.697	10.974.902.939	8.779.922.352	35.119.689.406
2.381.149.862	476.229.972	380.983.978	1.523.935.912
6.381.390.964	1.276.278.193	1.021.022.554	4.084.090.217
616.724.152	123.344.830	98.675.864	394.703.458
59.889.091	11.977.818	9.582.255	38.329.018
26.115.607.968	5.223.121.594	4.178.497.275	16.713.989.099
4.719.457.977	943.891.595	755.113.276	3.020.453.105
25.968.146.789	5.193.629.358	4.154.903.486	16.619.613.945
10.379.123.772	2.075.824.754	1.660.659.803	6.642.639.214
301.008.568	60.201.714	48.161.371	192.645.484
2.614.718.070	522.943.614	418.354.891	1.673.419.565
204.142.431	40.828.486	32.662.789	130.651.156
1.002.518	200.504	160.403	641.612
7.583.386	1.516.677	1.213.342	4.853.367
18.194.738	3.638.948	2.911.158	11.644.632
16.610.293.776	3.322.058.755	2.657.647.004	10.630.588.016
12.883.626.404	2.576.725.281	2.061.380.225	8.245.520.898
16.494.997.589	3.298.999.518	2.639.199.614	10.556.798.457
2.317.067.980	463.413.596	370.730.877	1.482.923.507
24.465.485.469	4.893.097.094	3.914.477.675	15.657.910.700

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
145	PAPUA	NABIRE	8.524,14	26.424,8
146	PAPUA BARAT	FAKFAK	2.559,94	7.935,8
147	PAPUA BARAT	MANOKWARI	22.422,24	69.509,0
148	PAPUA BARAT	MAYBRAT	3.509,50	10.879,4
149	PAPUA BARAT	SORONG	18.966,60	58.796,5
150	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	3.699,12	11.467,3
151	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	7.498,98	23.246,8
152	RIAU	BENGKALIS	239.140,15	741.334,5
153	RIAU	DUMAI	68.194,22	211.402,1
154	RIAU	INDRAGIRI HILIR	549.452,67	1.703.303,3
155	RIAU	INDRAGIRI HULU	278.213,76	862.462,7
156	RIAU	KAMPAR	425.563,89	1.319.248,1
157	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	31.462,58	97.534,0
158	RIAU	KUANTAN SINGINGI	157.378,78	487.874,2
159	RIAU	PEKANBARU	22.642,68	70.192,3
160	RIAU	PELALAWAN	371.413,58	1.151.382,1
161	RIAU	ROKAN HILIR	484.637,44	1.502.376,1
162	RIAU	ROKAN HULU	460.448,09	1.427.389,1
163	RIAU	SIAK	301.565,67	934.853,6
164	SULAWESI BARAT	MAJENE	245,15	760,0
165	SULAWESI BARAT	MAMUJU	11.053,64	34.266,3
166	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	51.262,10	158.912,5
167	SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	92.717,35	287.423,8
168	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	663,01	2.055,3
169	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	118,37	367,0
170	SULAWESI SELATAN	LUWU	122,14	378,6
171	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	13.525,36	41.928,6
172	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	16.741,74	51.899,4
173	SULAWESI SELATAN	PINRANG	1,76	5,5
174	SULAWESI SELATAN	SINJAI	0,72	2,2
175	SULAWESI SELATAN	WAJO	1.470,55	4.558,7
176	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	20.391,66	63.214,1
177	SULAWESI TENGAH	BUOL	17.927,83	55.576,3
178	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	11.261,20	34.909,7
179	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	13.131,86	40.708,8
180	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	39.342,85	121.962,8

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
6.083.162.047	1.216.632.409	973.305.927	3.893.223.710
1.826.875.719	365.375.144	292.300.115	1.169.200.460
16.001.392.270	3.200.278.454	2.560.222.763	10.240.891.053
2.504.515.973	500.903.195	400.722.556	1.602.890.223
13.535.311.793	2.707.062.359	2.165.649.887	8.662.599.548
2.639.838.146	527.967.629	422.374.103	1.689.496.413
5.351.568.551	1.070.313.710	856.250.968	3.425.003.873
170.659.790.216	34.131.958.043	27.305.566.435	109.222.265.738
48.666.067.215	9.733.213.443	7.786.570.754	31.146.283.018
392.110.967.027	78.422.193.405	62.737.754.724	250.951.018.897
198.544.246.240	39.708.849.248	31.767.079.398	127.068.317.594
303.699.075.648	60.739.815.130	48.591.852.104	194.367.408.415
22.452.933.839	4.490.586.768	3.592.469.414	14.369.877.657
112.311.671.116	22.462.334.223	17.969.867.379	71.879.469.515
16.158.702.850	3.231.740.570	2.585.392.456	10.341.569.824
265.055.289.046	53.011.057.809	42.408.846.247	169.635.384.989
345.856.276.860	69.171.255.372	55.337.004.298	221.348.017.191
328.593.807.871	65.718.761.574	52.575.009.259	210.300.037.038
215.209.081.749	43.041.816.350	34.433.453.080	137.733.812.319
174.945.741	34.989.148	27.991.319	111.965.275
7.888.314.260	1.577.662.852	1.262.130.282	5.048.521.126
36.582.641.515	7.316.528.303	5.853.222.642	23.412.890.570
66.166.734.921	13.233.346.984	10.586.677.587	42.346.710.349
473.153.014	94.630.603	75.704.482	302.817.929
84.476.364	16.895.273	13.516.218	54.064.873
87.165.122	17.433.024	13.946.420	55.785.678
9.652.223.716	1.930.444.743	1.544.355.794	6.177.423.178
11.947.558.834	2.389.511.767	1.911.609.414	7.646.437.654
1.259.054	251.811	201.449	805.795
513.910	102.782	82.226	328.903
1.049.438.877	209.887.775	167.910.220	671.640.881
14.552.286.618	2.910.457.324	2.328.365.859	9.313.463.436
12.794.004.667	2.558.800.933	2.047.040.747	8.188.162.987
8.036.431.332	1.607.286.266	1.285.829.013	5.143.316.052
9.371.409.502	1.874.281.900	1.499.425.520	5.997.702.081
28.076.600.580	5.615.320.116	4.492.256.093	17.969.024.371

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
181	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	843,30	2.614,2
182	SULAWESI TENGAH	POSO	5.631,83	17.458,7
183	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	324,33	1.005,4
184	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI	2.046,05	6.342,8
185	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA	2.289,06	7.096,1
186	SULAWESI TENGGARA	BUTON	37,13	115,1
187	SULAWESI TENGGARA	BUTON TENGAH	8,98	27,8
188	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	128,66	398,8
189	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	12,38	38,4
190	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	12.801,01	39.683,1
191	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR	802,80	2.488,7
192	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	77,69	240,8
193	SULAWESI TENGGARA	KONAWE	12.821,22	39.745,8
194	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	7.486,71	23.208,8
195	SULAWESI TENGGARA	KONAWE UTARA	19.310,20	59.861,6
196	SULAWESI TENGGARA	MUNA	10,27	31,8
197	SUMATERA BARAT	AGAM	51.655,73	160.132,8
198	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA	108.474,47	336.270,8
199	SUMATERA BARAT	LIMAPULUHKOTA	2.660,42	8.247,3
200	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	1.651,52	5.119,7
201	SUMATERA BARAT	PARIAMAN	53,46	165,7
202	SUMATERA BARAT	PASAMAN	8.229,42	25.511,2
203	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	208.775,36	647.203,6
204	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	90.063,42	279.196,6
205	SUMATERA BARAT	SAWAHLUNTO	221,40	686,3
206	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	27.393,98	84.921,4
207	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	57.802,37	179.187,3
208	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	325.445,51	1.008.881,1
209	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	8.080,46	25.049,4
210	SUMATERA SELATAN	LAHAT	54.460,29	168.826,9
211	SUMATERA SELATAN	LUBUK LINGGAU	1.057,84	3.279,3
212	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	71.669,51	222.175,5
213	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	464.652,88	1.440.423,9
214	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	90.150,78	279.467,4
215	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	67.247,51	208.467,3
216	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	24.372,70	75.555,4
217	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	272.567,82	844.960,2

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
601.809.729	120.361.946	96.289.557	385.158.227
4.019.096.757	803.819.351	643.055.481	2.572.221.924
231.457.680	46.291.536	37.033.229	148.132.915
1.460.144.786	292.028.957	233.623.166	934.492.663
1.633.561.325	326.712.265	261.369.812	1.045.479.248
26.498.417	5.299.683	4.239.747	16.958.987
6.405.222	1.281.044	1.024.836	4.099.342
91.817.602	18.363.520	14.690.816	58.763.265
8.836.518	1.767.304	1.413.843	5.655.372
9.135.301.610	1.827.060.322	1.461.648.258	5.846.593.030
572.908.219	114.581.644	91.665.315	366.661.260
55.439.282	11.087.856	8.870.285	35.481.140
9.149.728.652	1.829.945.730	1.463.956.584	5.855.826.337
5.342.807.514	1.068.561.503	854.849.202	3.419.396.809
13.780.516.100	2.756.103.220	2.204.882.576	8.819.530.304
7.325.801	1.465.160	1.172.128	4.688.513
36.863.556.729	7.372.711.346	5.898.169.077	23.592.676.306
77.411.631.329	15.482.326.266	12.385.861.013	49.543.444.050
1.898.580.592	379.716.118	303.772.895	1.215.091.579
1.178.591.837	235.718.367	188.574.694	754.298.776
38.150.339	7.630.068	6.104.054	24.416.217
5.872.839.760	1.174.567.952	939.654.362	3.758.617.446
148.990.279.723	29.798.055.945	23.838.444.756	95.353.779.023
64.272.786.575	12.854.557.315	10.283.645.852	41.134.583.408
157.996.905	31.599.381	25.279.505	101.118.019
19.549.421.425	3.909.884.285	3.127.907.428	12.511.629.712
41.250.036.635	8.250.007.327	6.600.005.862	26.400.023.446
232.250.672.883	46.450.134.577	37.160.107.661	148.640.430.645
5.766.535.178	1.153.307.036	922.645.629	3.690.582.514
38.864.997.044	7.772.999.409	6.218.399.527	24.873.598.108
754.919.330	150.983.866	120.787.093	483.148.371
51.146.171.749	10.229.234.350	8.183.387.480	32.733.549.919
331.594.510.819	66.318.902.164	53.055.121.731	212.220.486.924
64.335.134.137	12.867.026.827	10.293.621.462	41.174.485.848
47.990.456.107	9.598.091.221	7.678.472.977	30.713.891.909
17.393.311.314	3.478.662.263	2.782.929.810	11.131.719.241
194.515.083.085	38.903.016.617	31.122.413.294	124.489.653.174

No.	Provinsi Penghasil Sawit	Kabupaten/Kota Penghasil Sawit	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)
218	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	42.782,20	132.624,8
219	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1.838,40	5.699,0
220	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	18.459,55	57.224,6
221	SUMATERA SELATAN	PAGAR ALAM	35,96	111,5
222	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	466,24	1.445,4
223	SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	20.230,95	62.715,9
224	SUMATERA SELATAN	PRABUMULIH	1.447,93	4.488,6
225	SUMATERA UTARA	ASAHAN	256.632,53	795.560,8
226	SUMATERA UTARA	BATU BARA	57.426,26	178.021,4
227	SUMATERA UTARA	BINJAI	2.804,72	8.694,6
228	SUMATERA UTARA	DAIRI	968,68	3.002,9
229	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	87.983,31	272.748,3
230	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	261,85	811,7
231	SUMATERA UTARA	KARO	3.956,30	12.264,5
232	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	194.490,32	602.920,0
233	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	234.157,69	725.888,8
234	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA	211.535,27	655.759,3
235	SUMATERA UTARA	LANGKAT	253.466,67	785.746,7
236	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	109.684,29	340.021,3
237	SUMATERA UTARA	MEDAN	172,00	533,2
238	SUMATERA UTARA	NIAS	46,23	143,3
239	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	153,56	476,0
240	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	173.787,67	538.741,8
241	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	133.874,74	415.011,7
242	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	154,90	480,2
243	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT	934,46	2.896,8
244	SUMATERA UTARA	PEMATANG SIANTAR	646,33	2.003,6
245	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	109.246,97	338.665,6
246	SUMATERA UTARA	SIBOLGA	5,22	16,2
247	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	169.595,23	525.745,2
248	SUMATERA UTARA	TANJUNG BALAI	3.201,31	9.924,0
249	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	38.523,87	119.424,0
250	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	32.113,54	99.552,0
251	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	24,17	74,9
252	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI	659,11	2.043,2
253	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	2.516,86	7.802,3
Total			16.381.974,30	50.784.120,3

PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
	Pemerintah Pusat (20%)	Pemerintah Provinsi (16%)	Pemerintah Kab/Kota (64%)
30.531.057.262	6.106.211.452	4.884.969.162	19.539.876.648
1.311.953.748	262.390.750	209.912.600	839.650.399
13.173.458.446	2.634.691.689	2.107.753.351	8.431.013.405
25.665.934	5.133.187	4.106.549	16.426.198
332.729.929	66.545.986	53.236.789	212.947.154
14.437.597.564	2.887.519.513	2.310.015.610	9.240.062.441
1.033.302.700	206.660.540	165.328.432	661.313.728
183.143.031.732	36.628.606.346	29.302.885.077	117.211.540.309
40.981.629.566	8.196.325.913	6.557.060.731	26.228.242.922
2.001.561.201	400.312.240	320.249.792	1.280.999.169
691.291.594	138.258.319	110.606.655	442.426.620
62.788.341.328	12.557.668.266	10.046.134.613	40.184.538.450
186.866.184	37.373.237	29.898.589	119.594.358
2.823.371.642	564.674.328	451.739.463	1.806.957.851
138.795.920.285	27.759.184.057	22.207.347.246	88.829.388.982
167.104.107.561	33.420.821.512	26.736.657.210	106.946.628.839
150.959.863.381	30.191.972.676	24.153.578.141	96.614.312.564
180.883.756.079	36.176.751.216	28.941.400.973	115.765.603.891
78.275.012.777	15.655.002.555	12.524.002.044	50.096.008.177
122.746.635	24.549.327	19.639.462	78.557.846
32.994.617	6.598.923	5.279.139	21.116.555
109.584.092	21.916.818	17.533.455	70.133.819
124.021.693.282	24.804.338.656	19.843.470.925	79.373.883.701
95.538.266.105	19.107.653.221	15.286.122.577	61.144.490.307
110.545.257	22.109.051	17.687.241	70.748.965
666.869.458	133.373.892	106.699.113	426.796.453
461.246.644	92.249.329	73.799.463	295.197.852
77.962.922.239	15.592.584.448	12.474.067.558	49.896.270.233
3.725.305	745.061	596.049	2.384.195
121.029.802.661	24.205.960.532	19.364.768.426	77.459.073.703
2.284.577.136	456.915.427	365.532.342	1.462.129.367
27.492.142.800	5.498.428.560	4.398.742.848	17.594.971.392
22.917.478.214	4.583.495.643	3.666.796.514	14.667.186.057
17.247.942	3.449.588	2.759.671	11.038.683
470.364.312	94.072.862	75.258.290	301.033.160
1.796.128.532	359.225.706	287.380.565	1.149.522.261
11.690.819.130.021	2.338.163.826.004	1.870.531.060.803	7.482.124.243.213

